

**PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA SUATU ANALISIS  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
NOMOR : 0689/PDT.G/2012/PA.SKA**

**NASKAH PUBLIKASI**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :  
AULIA SHINA  
NIM : C. 100.080.148

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jln. A. Yani Tromol Pos 1-Pabelan Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax. 715448 Surakarta 57102

---

Surat persetujuan naskah artikel publikasi ilmiah.

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/ tugas akhir :

Nama : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

Telah mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa :

Nama : Aulia Shina

NIM : C. 100.080.148

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA SUATU ANALISIS  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR  
: 0689/PDT.G/2012/PA.SKA**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan yang dibuat, semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Pembimbing

Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

**PERYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Shina

N I M : C. 100.080.148

Alamat : Perum. VILLA NUSA INDAH II No. 30, klegen-colomadu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Oktober 2013

Yang membuat pernyataan,



.....(Aulia Shina).....

NIM C. 100.080.148

**PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA SUATU ANALISIS  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
NOMOR : 0689/PDT.G/2012/PA.SKA**

**Penulis :  
AULIA SHINA  
(C.100.080.148)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

**ABSTRACT**

*In the minithesis writing titled Divorce and Its legal Consequence: An analysis on verdict of Religious Court of Surakarta No. 0689/PDT.G/2012/PA.SKA., that had been prepared by author has background that there are often marriage failures in society caused by worldly matters experienced by husband and wife in the household process. Consequently, disagreement and different view of world is often experienced in their household life. Moreover, these may cause disputes and hostile attitudes between husband and wife, although reconciliation effort had been attempted. It is often found that life of marriage is very bad and it is not repaired, so one solution is a divorce. The break of marriage is seen as a final way for the husband and wife after many efforts had been conducted in order to maintain the marriage, and then, divorce occurs.*

*The research is a doctrinal-legal study, namely, a study based on act or prevailing legal regulation and doctrines. The study is also based on a qualitative-nondoctrinal legal study, because the law is not only conceptualized as entire principles and norms to regulate human life in society, but it includes institutions and processes realizing the norms of society, as a materialization of symbolic meaning of social doer, as manifested and implied in and from action and interaction between them.*

*Author conducted the study in office of Religious Court of Surakarta as legal institution in settling divorce problems between Muslim by breaking marriage between divorcees.*

**ABSTRAK**

*Dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR : 0689/PDT.G/2012/PA.SKA” yang telah disusun oleh penulis, dengan latar belakang Di dalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan dalam membina rumah tangganya yang disebabkan oleh masalah-masalah duniawi yang dialami oleh sepasang suami-istri. Sehingga sering timbul ketidak kesepakatan dan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan sampai menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara suami dan istri, walaupun usaha damai telah diupayakan. Sering dijumpai di dalam masyarakat, suatu kehidupan perkawinan karena suatu sebab menjadi demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, maka akan lebih baik bila perkawinan itu diputuskan dari pada berlangsung terus. Dengan*

*diputuskannya tali perkawinan dipandang sebagai jalan terakhir bagi kedua belah pihak setelah diusahakan adanya upaya perdamaian yang gagal, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan timbulah perceraian.*

*Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian hukum non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.*

*Penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Surakarta sebagai Lembaga Hukum yang menyelesaikan masalah perceraian untuk individu yang beragama muslim dengan cara memutuskan ikatan pernikahan antara pihak yang ingin bercerai.*

## **A. PENDAHULUAN**

Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan para pihak yaitu suami-istri dan menginginkan agar perkawinan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung secara kekal sampai ada salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah tidak semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi didalam kenyataannya bahwa tidak selalu keinginan hidup bersama secara kekal dan abadi itu dapat terlaksana.

Di dalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan dalam membina rumah tangganya yang disebabkan oleh masalah-masalah duniawi yang dialami oleh

sepasang suami-istri. Sehingga sering timbul ketidak kesepakatan dan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan sampai menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara suami dan istri, walaupun usaha damai telah diupayakan. Sering dijumpai di dalam masyarakat, suatu kehidupan perkawinan karena suatu sebab menjadi demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, maka akan lebih baik bila perkawinan itu diputuskan dari pada berlangsung terus. Dengan diputuskannya tali perkawinan dipandang sebagai jalan terakhir bagi kedua belah pihak setelah diusahakan adanya upaya perdamaian yang gagal, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan timbulah perceraian.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa alasan-alasan dari perceraian ditinjau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA?
2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

1. Tujuan Penelitian untuk:
  - a. Mengetahui alasan-alasan dari perceraian ditinjau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA
  - b. Mengetahui akibat hukum dari perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA.

## 2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Islam.
- 2) Menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum.

### b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan suatu acuan dalam menelaah alasan dan akibat perceraian.

## **D. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Penelitian ini juga mendasarkan pada penelitian hukum non-doktrinal yang kualitatif.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya*, Hal. 1 dan 3

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama atas perkara nomor 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA. Bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Surakarta; Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Sumber data primer Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjelasan atau keterangan yang diperoleh dari wakil panitera yang bekerja di Pengadilan Agama dan Hakim yang ditunjuk untuk memberikan keterangan guna pengumpulan data yang lebih lengkap; Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi tiga, yaitu bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, bahan Hukum tersier.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memuaskan maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf yang bekerja di Pengadilan



Agama Surakarta yaitu ibu Tri Purwanai S.H yang menjabat sebagai wakil penitera di Pengadilan tersebut. Ibu Tri Purwani mengatakan bahwa alasan-alasan dari perceraian ditinjau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan melakukan wawancara tersebut maka penulis memperoleh beberapa keterangan serta data yang diperlukan didalam melakukan penelitiannya, yaitu Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh penulis mengenai putusan perceraian, dalam hal ini penulis akan mengemukakan alasan-alasan atau faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara SAPTANI NATALIA bin DASUKI MARGONO (PENGGUGAT) dengan SYARIF HIDAYAT bin MUJIONO ARISANTO (TERGUGAT) di Pengadilan Agama Surakarta yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering pergi sampai berhari-hari baru pulang, bukan untuk kepentingan rumah tangga bersama dan kalau Penggugat tanya dari mana hanya diam saja;
- b. Tergugat hampir tiap hari minum minuman keras sampai mabuk;

Alasan ini bahwa suami istri terus menerus berselisih lebih menitikberatkan pada tingkat keharmonisan pasangan suami-istri tersebut yaitu sering berbeda pendapat mengenai berbagai masalah otomatis menimbulkan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Senin 8 Juli 2013 pukul 11.30. WIB dengan salah satu narasumber, yaitu dengan seorang Hakim dari Pengadilan Agama Surakarta Bapak H. Arief Qommarudin S.H. yang

mengatakan bahwa akibat dari perceraian tersebut jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka akibat tersebut dapat dilihat secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 disitu ditulis:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan tentang anak-anak Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat menentukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>2</sup>

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan perkara pada Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA, dapat diketahui dengan jelas apa yang dapat dijadikan alasan-alasan yang terjadinya perceraian, yaitu karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih karena Tergugat sering pergi sampai sehari-hari baru pulang, bukan untuk kepentingan rumah tangga bersama dan kalau Penggugat tanya dari mana hanya diam saja dan hampir tiap hari minum minuman keras sampai mabuk. Disamping itu juga Tergugat setelah mempunyai anak tidak bekerja atau pengangguran sehingga tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang memberikan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan salah satu narasumber, yaitu dengan seorang Hakim dari Pengadilan Agama Surakarta Bapak H. Arief Qommarudin S.H. hari Senin 8 Juli 2013 pukul 11.30. WIB

nafkahnya kepada istrinya, dan tidak mempedulikan terhadap diri penggugat selama  $\pm$  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Apabila alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam.

Masalahnya adalah tentang pembuktian alasan-alasan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut untuk memberikan pengakuan atau bantahan mengenai hal yang didakwakan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan dakwaannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah mengemukakan yang pada intinya para saksi ini membenarkan dakwaan Penggugat.

Dengan Keputusan Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Seperti pada kasus di atas menurut anggapan penulis sudah sangat tepat, karena gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan baik menurut Undang-Undang Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai jatuhnya talak satu khul'I dari tergugat kepada penggugat karena Penggugat (istri) membayar *'iwadl* (pengganti) karena pelanggaran taklik talak

memang dilakukan dengan keputusan Pengadilan Agama, dan dengan talak yang dijatuhkan itu selalu talak satu *khul'i* karena adanya *'iwadl* sehingga mengakibatkan sebagai suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (*talak ba'in*).

Mengenai verstek yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Surakarta karena tergugat sama sekali tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakil kuasanya, maka terhadap putusan verstek ini tergugat diberi hak untuk mengajukan verzet sebagai upaya hukumnya yang dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis apabila tergugat tidak puas atau merasa dirugikan atas putusan verstek tersebut. Kecuali apabila tergugat menerima segala putusan hakim beserta akibat hukumnya yang tetap dan tergugat tidak dapat mengajukan verzet atas putusan tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan suatu model atau performance keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang.

Perkawinan juga merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena perkawinan/pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta adanya hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarganya

berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang.

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang yang menjadi performance merupakan idaman bagi setiap pasangan suami isteri merupakan upaya yang tidak mudah, tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah memperketat adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak;
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

a. **Terhadap Hubungan Suami-Istri**

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat

kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

#### **b. Terhadap Anak**

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

#### **c. Terhadap Harta Bersama**

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya

masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.



Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.<sup>3</sup>

#### d. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi :

- 1) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal. 189

- 2) Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “ Perceraian dan akibat hukum nya suatu analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0689/PDT.G/2012/PA.SKA” , maka penulis dapat menyimpulkan:

Alasan-alasan dari perceraian ditinjau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga yang sakinah serta bahagia dan untuk kekal selama hidup kedua pasang suami-istri seringkali putus disebabkan oleh karena perceraian. Dan perceraian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor atau alasan yang beragam. Di dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0689/PDT.G/2012/PA.SKA” yang dijadikan alasan-alasan atau faktor perceraian bagi seorang muslim disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih karena Tergugat sering pergi sampai sehari-hari baru pulang, bukan untuk kepentingan rumah tangga bersama dan kalau Penggugat tanya dari mana hanya diam saja dan hampir tiap hari minum minuman keras sampai mabuk. Disamping itu juga Tergugat setelah mempunyai anak tidak bekerja atau pengangguran otomatis tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang memberikan nafkahnya kepada istrinya, dan tidak mempedulikan terhadap diri penggugat. Dari alasan-alasan kasus tersebut yang dapat dijadikan alasan seorang untuk bercerai adalah berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19

huruf a dan f dan berdasarkan ikrar taklik talak pernikahan point ke 2 dan 4.

Perceraian dalam kasus tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf a dan f, yaitu : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan ikrar Taklik Talak pernikahan point ke 2 dan 4, yaitu : Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; dan Saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Akibat hukum dari perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA

Dari putusan Pengadilan Agama Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA akibat hukum bagi seseorang yang telah melakukan perceraian, antara lain adalah baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara anak yang ditinggalkannya, bapak dan ibu bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan pengadilan dapat menentukan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau kewajiban kepada bekas istrinya.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai apa yang menjadi alasan-alasan yang memungkinkan seorang muslim untuk bercerai beserta akibatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perceraian yang sering kali terjadi, salah satu halnya disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pihak akan arti dan tujuan perkawinan serta hak-hak dan kewajibannya sebagai suami-istri sebagai mana yang terdapat di dalam

Undang-Undang Perkawinan. Untuk itu penulis mencoba menyarankan agar pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang lebih giat untuk melakukan penyuluhan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya bagi masyarakat dan masyarakat muslim khususnya.

- b. Di dalam memutuskan suatu perkara perceraian, seorang hakim haruslah selalu berpedoman pada Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai apa akibat yang akan timbul dari ada perceraian tersebut. Sehingga akibat dari perceraian tersebut tidak menyimpang jauh dari apa akibat hukum dengan adanya perceraian seperti yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.

## DAFTAR PUSTAKA

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961),

Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana*, Universitas Airlangga, Surabaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **Hasil wawancara**

Hasil wawancara dengan salah satu narasumber, yaitu dengan seorang Hakim dari Pengadilan Agama Surakarta Bapak H. Arief Qommarudin S.H. hari Senin 8 Juli 2013 pukul 11.30. WIB